

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Segala aktivitas yang dilakukan manusia selalu menghasilkan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik (*degradable*) dan sampah anorganik (*undegradable*). Jika dilihat dari sumbernya jenis sampah dapat dibagi kembali menjadi beberapa macam yaitu: sampah yang berasal dari manusia, sampah yang berasal dari alam, sampah yang berasal dari kegiatan industri, sampah yang berasal dari pertambangan, sampah konsumsi, sampah nulir atau limbah radioaktif (Nurlita, 2019). Aktivitas manusia yang semakin meningkat dari hari ke hari ini mengakibatkan sampah yang dihasilkan turut meningkat.

Sampah yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan tumpukan sampah yang semakin tinggi. Tingginya volume sampah yang tersebar dimana-mana menjadi permasalahan utama dari kebersihan lingkungan (Kartomiharjo et al., 2019:2). Jika sampah dibiarkan menumpuk terlalu lama maka akan dapat menyebabkan permasalahan lingkungan yang lain seperti, bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Selanjutnya, pembuangan sampah padat ke saluran air dan sungai dapat menyebabkan banjir. Sampah juga berpengaruh terhadap keadaan sosial dan ekonomi di suatu negara. Apabila sampah tidak dapat dikelola dengan baik maka dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat.

Anggota masyarakat akan mudah terkena penyakit karena permukimannya yang tidak sehat. Jika masyarakat sakit maka pembiayaan yang dikeluarkan juga semakin meningkat serta dapat mengganggu produktifitas kerja dan hal ini membebani ekonomi negara dari sisi pembiayaan jaminan kesehatan. Sebaliknya, jika beban ekonomi dapat dikurangi maka pembangunan nasional akan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Tangkasarong, 2017). Sehingga dapat dipahami bahwa sampah dapat menjadi permasalahan yang berdampak sangat serius dan menjadi urgensi jika tidak ditangani dengan cepat. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang tepat untuk mengurangi tingkat timbunan sampah agar lingkungan bersih dan sehat dapat terwujud.

Permasalahan sampah di Indonesia sampai saat ini masih menjadi persoalan nasional yang belum memiliki pemecahan yang baik. Dibuktikan dari data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jumlah timbunan sampah nasional yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu mencapai 67,8 Juta ton per tahun . Sedangkan jumlah sampah nasional pada tahun 2019 berjumlah 64 Juta ton per tahun. Komposisi sampah tersebut diantaranya adalah sampah organik (sisa makanan dan sisa tumbuhan) sebesar 50%, plastik sebesar 15%, dan kertas sebesar 10% dan Sisanya terdiri dari logam, karet, kain, kaca, dan lain-lain (<http://ppid.menlhk.go.id/>).

Timbunan sampah yang tinggi disebabkan oleh salah satunya tingkat pertumbuhan penduduk. Menurut Rendy (2015:73), penambahan jumlah penduduk diperkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang di hasilkan.

Tabel 1.1
10 Negara dengan Jumlah Penduduk Paling Banyak di Dunia Tahun 2020

No.	Negara	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	China	1.394.015.977
2.	India	1.326.093.247
3.	Amerika Serikat	332.639.102
4.	Indonesia	267.026.366
5.	Pakistan	233.500.636
6.	Nigeria	190.632.261
7.	Brazil	211.715.973
8.	Bangladesh	162.650.853
9.	Rusia	141.722.205
10.	Mexico	128.649.565

(Sumber : CIA World Factbook tahun, 2020)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indonesia sebagai negara berkembang menduduki urutan ke-4 sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak didunia. Menurut Syarif Dongoran et al., (2018:48),Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan jika laju pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan tingkat konsumsi penduduk juga turut meningkat, dampak langsungnya jumlah limbah seperti sampah yang dihasilkan oleh manusia setiap harinya.Ditambah lagi dengan adanya arus urbanisasi yang cepat pada suatu perkotaan yang menyebabkan aktivitas masyarakat di kota tersebut juga akan meningkat. Sehingga peningkatan populasi, urbanisasi dan industrialisasi di negara-negara berkembang ikut berkontribusi terhadap adanya penumpukan sampah (Suyatmi & Mulasari, 2014:8).

Menurut data yang diperoleh dari BPS (bps.go.id),penduduk di Pulau Jawa pada tahun 2020 mencapai 152,4 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan separuh penduduk Indonesia yang mencapai 266,91 juta jiwa. Sehingga Pulau jawa dapat dikatakan penyumbang sampah terbanyak di Indonesia dan salah

satunya adalah Jawa Timur. Mengapa demikian, dikarenakan Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk di Jawa Timur menurut data sensus penduduk tahun 2018 mencapai 39.292.972 jiwa. Selain jumlah penduduk yang tinggi, Jawa Timur juga menjadi kawasan pengembangan perindustrian yang padat. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur tahun 2018 (jatim.bps.go.id) yaitu jumlah perusahaan yang ada berjumlah 816.804. Banyaknya perusahaan yang tersebar ini mendorong laju urbanisasi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini didukung dengan pernyataan menurut Ardiansyah (2016:118) yaitu, tidak dapat dipungkiri lagi kawasan di Jawa Timur juga berpotensi menjadi penyumbang sampah terbanyak. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), produksi sampah yang ada di Provinsi Jawa Timur mencapai sebanyak 5.424.120 Ton per harinya.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur juga menghadapi masalah serupa. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan daerah pemukiman semakin luas dan padat (Affandi et al., 2015:108). Saat ini Kabupaten Sidoarjo telah menjadi kawasan industri yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sidoarjo sebesar 3133,67 jiwa. Selanjutnya, perkembangan jumlah penduduk di kabupaten sidoarjo selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dibuktikan dari data yang diperoleh dari Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo

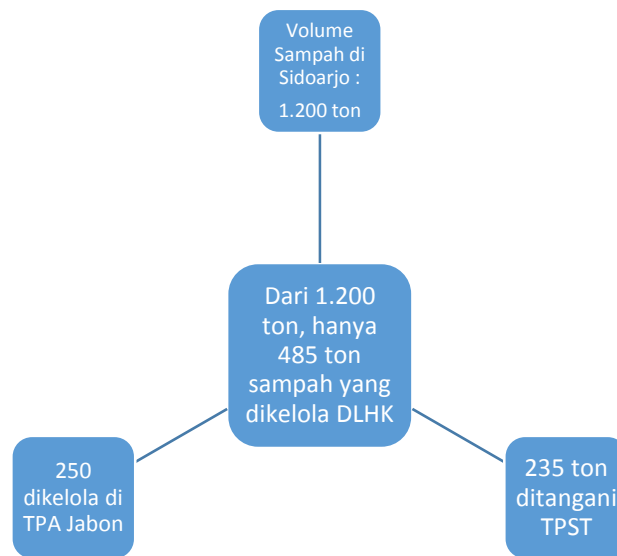
No.	Jumlah Penduduk/Jiwa	Tahun
1.	2.161.659	2015
2.	2.207.589	2016
3.	2.214.075	2017
4.	2 238 069	2018
5.	2.262.440	2019

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo 2019

Selain pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah industri di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 berjumlah 34.802 perusahaan. Dalam hal ini, Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang yang menduduki peringkat pertama berjumlah 48.967 perusahaan. Hal ini menyebabkan Sidoarjo menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dari daerah lain untuk menjadikan sebagai tujuan urbanisasi. Peningkatan penduduk dan banyaknya industri yang ada berpengaruh terhadap volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Sidoarjo. Karena kepadatan penduduk dan jumlah industri yang tinggi saat ini membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi kewalahan dalam menangani volume peningkatan sampah yang berasal dari hasil kegiatan warga masyarakat setiap harinya.

Pernyataan tersebut didukung dengan berita yang diperoleh dari media online Surabaya.tribunnews dan berikut data diolah oleh peneliti dengan menggunakan bagan:

Gambar 1.1
Volume sampah di Kabupaten Sidoarjo



Sumber : (<https://surabaya.tribunnews.com/2019/10/27/sidoarjo-belum-bisa-mengelola-sampah-untuk-pembangkit-listrik> , diakses pada tanggal 15 Oktober 2020)

Dari berita tersebut dapat dimaknai bahwa setiap harinya volume sampah di kabupaten Sidoarjo sebesar 1.200 ton, namun hanya 485 ton saja yang mampu dikelola sehingga terdapat sekitar 715 ton sampah yang belum bisa ditangani. Oleh karena itu program-program terhadap pengelolaan sampah di Sidoarjo terus menjadi perhatian banyak kalangan.

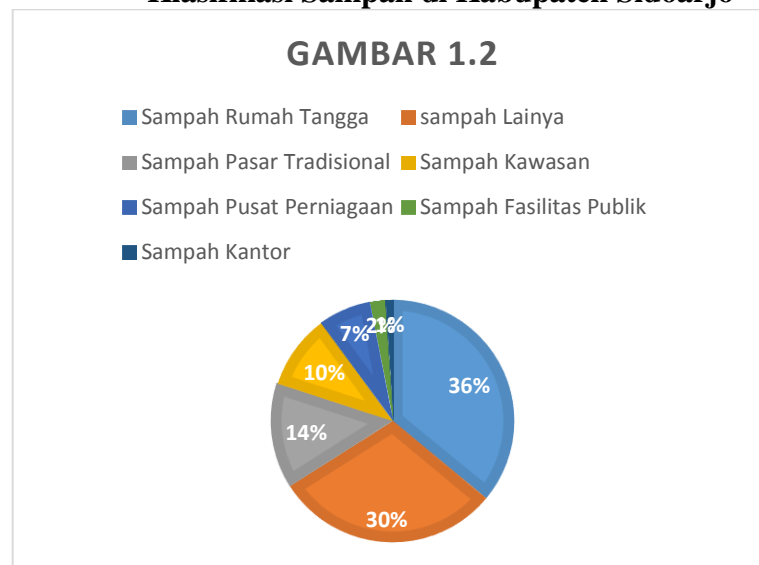
Dalam berita yang dimuat dalam Akuratnews.com menyatakan bahwa banyaknya jumlah sampah yang masih belum bisa dikelola dengan baik, disebabkan salah satunya karena TPA atau Tempat Pembuangan Akhir di Sidoarjo yang hanya memiliki satu tempat yaitu di Desa Kupang, Kecamatan Jabon. Saat ini timbunan sampah di tengah masyarakat Sidoarjo sudah mencapai 1.300 ton, namun sampah yang terangkut ke TPA Jabon hanya 420 ton atau sekitar 32% dan sisanya 68% masih berada di lingkungan masyarakat. Sedangkan,

kondisi TPA *existing* di Jabon seluas delapan hektar itu sudah cover-kapasitas. Terlebih, menambah dan mencari lahan baru untuk TPA sangat sulit. Kondisi TPA ini tidak sebanding dengan jumlah sampah yang masuk dikarenakan lahan yang kecil, sedangkan Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan, sehingga tidak efektif untuk menampung sampah.

Menyikapi hal tersebut pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah membuat solusi dengan membangun lahan *Sanitary Landfill* di Desa Kupang Kecamatan Jabon. Pembangunan TPA *Sanitary Landfill* ini merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah Jerman. Sekarang ini, proses pembangunan *Sanitary Landfill* masih terus berlangsung. Mengutip dari berita yang dimuat dalam [Surya.co.id](https://surya.co.id) menjelaskan bahwa diprediksi pusat penanganan sampah di Sidoarjo tersebut bakal rampung pembangunannya pada Januari 2020 (<https://surabaya.tribunnews.com/2019/03/10/pemkab-sidoarjo-akan-menutup-tpa-di-jabon>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020). Namun berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, kenyataannya hingga saat ini pembangunan lahan *Sanitary Landfill* yang telah dilaksanakan dari tahun 2017 tersebut belum kunjung selesai. Hal ini dikarenakan beberapa peralatan *shorting* dan komposting sudah terkirim, tetapi tenaga instal dari Jerman masih belum bisa berangkat ke Indonesia akibat pandemi COVID-19. Adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia menyebabkan pembangunan TPA *Sanitary Landfill* terhambat, sehingga pengelolaan sampah berbasis lahan urug saniter di Kabupaten Sidoarjo belum kunjung terlaksana.

Data dari DLHK Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa 2,2 juta penduduk di Kabupaten Sidoarjo setiap harinya dapat menghasilkan 0,54 kg/orang/hari atau setara dengan 1.240 ton/hari. Maka tidak salah jika timbunan sampah di TPA Jabon selalukelebihan kapasitas. Berikut adalah jenis timbunan sampah di kabupaten Sidoarjo yang diklasifikasikan menjadi beberapa poin yang dapat dilihat pada gambar 1.2 :

Gambar 1.2
Klasifikasi Sampah di Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Kebijakan Strategis Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa jenis timbunan sampah tertinggi di Kabupaten Sidoarjo adalah jenis Sampah Rumah Tangga atau disingkat SRT. Sampah jenis ini merupakan hasil dari kegiatan dalam rumah tangga sehari-hari. Maka dari itu permasalahan sampah harus diselesaikan dulu dari sumber sampah terbanyak yaitu sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai penghasil sampah, memiliki peran yang utama dalam pengelolaan persampahan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016:5)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya dalam mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Namun Kondisi yang ada saat ini, pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya yaitu masyarakat masih belum terintegrasi dengan baik, selain itu tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah juga masih rendah. Hal ini diketahui berdasarkan kutipan berita yang dimuat dalam media online CNN Indonesia :

“Rencananya, Senin ini (20/1) akan dipasang spanduk imbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan dilakukan pembersihan menggunakan alat berat. Kemudian, boks sampah akan ditempatkan di sepanjang sungai agar masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan sungai. Namun, kesemuanya dirasakan tidak optimal jika masyarakat tetap membuang sampah di sungai serta kurang peduli terhadap lingkungan. Untuk itu, partisipasi seluruh masyarakat Sidoarjo dalam menjaga sungai menjadi kunci agar meminimalisasi potensi banjir.”

(Sumber : <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200120121907-25-466928/sampah-menumpuk-bpbd-jatim-bersihkan-sungai-buntung-sidoarjo>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 23:00 WIB).

Dari berita diatas dapat dipahami pengelolaan sampah di masyarakat masih kurang optimal. Sehingga berbagai gerakan perlu ditingkatkan melalui peranan tokoh masyarakat, KSM (KSM) ataupun pemerintah sendiri.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dijelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. Selain itu juga dijelaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini berarti dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo memerlukan adanya sebuah kolaborasi antar pemangku kepentingan agar pelaksanaan penanganan sampah dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Istilah kolaborasi yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat diartikan sebagai *collaborative governance*. Menurut Adrian Devine et al (2011) dalam Arifin & Utami (2018:317) Kolaborasi saat ini menjadi bagian penting dalam manajemen sektor publik dan *collaborative governance* sendiri berkaitan penuh dengan pengambilan suatu kebijakan dimana ada proses penyatuan antar *stakeholders*.

Untuk menerapkan kebijakan yang dibuat tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah membuat strategi untuk mengurangi sampah di TPA, salah satunya dengan Pembangunan TPST (TPST). Program ini dijalankan secara aktif dan berkelanjutan mulai dari tahun 2007 hingga 2019 masih terus berjalan. TPST merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan diharapkan dengan adanya TPST pengurangan sampah dapat dilakukan. Saat ini di Sidoarjo menurut data dari Dinas

Kebersihan dan Lingkungan Hidup terdapat 116 TPST, namun yang berjalan optimal secara operasional hanya berjumlah 60 TPST, dan sisanya tidak aktif berjumlah 56 unit.

Selanjutnya, Rahman & Sentosa (2019:89) menjelaskan bahwa dengan naiknya kepadatan penduduk berarti jumlah orang per satuan luas bertambah, karena itu jumlah produk limbah per satuan luas juga bertambah, jadi dapat dikatakan bahwa di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi terjadi konsentrasi produksi limbah. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kepadatan jumlah penduduk disuatu daerah akan berpengaruh terhadap tingginya volume sampah (limbah). Berikut data jumlah kepadatan penduduk Kabupaten Sidoarjo yang diperoleh dari BPS (BPS,Kab.Sidoarjo):

Tabel 1.3
Penduduk Kabupaten Sidoarjo Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Waru	240.674
2.	Taman	235.238
3.	Sidoarjo	228.713
4.	Candi	168.779
5.	Krian	140.183
6.	Gedangan	134.787
7.	Sukodono	132.644
8.	Sedati	111.788
9.	Gedangan	108.457
10.	Tulangan	107.683
11.	Tanggulangin	106.685
12.	Wonoayu	90.794
13.	Porong	85.700
14.	Prambon	85.157
15.	Balongbendo	80.222
16.	Krembung	75.731
17.	Tarik	72.206

18.	Jabon	61.092
-----	-------	--------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Dari sekian banyaknya jumlah TPST di Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada TPST Kawasan Tambakrejo, Kecamatan Waru. Hal ini dikarenakan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru yang memiliki klasifikasi kepadatan jumlah penduduk tertinggi. Sehingga, dari tabel 1.3 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Waru merupakan Kecamatan yang menjadi penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Sidoarjo, karena memiliki jumlah kepadatan penduduk yang tinggi.

TPST Tambakrejo merupakan salah satu TPST Kawasan di Waru yang setiap harinya mampu menampung 25.000 ton sampah. TPST Kawasan ini dapat dikatakan berperan besar dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Waru dikarenakan selain jumlah lahan yang luas dan dapat menampung residu sampah yang besar, TPST Kawasan ini memiliki sarana dan prasarana lengkap dibandingkan dengan TPS/ TPS3R di desa Kecamatan Waru. Sehingga mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang dan pemrosesan sampah di Kecamatan Waru banyak dilakukan di TPST Kawasan Tambakrejo ini. Peran dari TPST Kawasan Tambakrejo inilah yang menentukan jumlah timbunan sampah yang akan dikirim ke TPA Jabon. Menurut Saibah et al. (2018:277) semakin banyak sampah yang berhasil direduksi di sumber akan semakin sedikit jumlah sampah yang akan dibawa dan ditimbun ke TPA.

Kegiatan pengelolaan sampah di TPST Kawasan Tambakrejo melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta atau

dunia usaha. Adapun pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo antara lain dari pihak pemerintah yang terlibat adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, pemerintah desa. Kemudian pihak masyarakat yang terlibat adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Guna Lestari. Sedangkan pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah di TPST Kawasan Tambakrejo adalah PT. Pondok Tjandra Indah. Jadi dapat dipahami bahwa Pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari peran masyarakat dan pihak swasta. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat (Zulfikar & Rinaldi, 2019:446). Kerjasama antar *stakeholders* yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di TPST Kawasan Tambakrejo mencirikan adanya *Collaborative Governance*.

Menurut Tilano & Suwitri (2019:3) dalam kaitannya dengan Administrasi Publik, *collaborative governance* merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri. Sejalan dengan Emerson, Nabatchi & Balogh dalam jurnal Kurniasih et al., (2017) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses dan struktur dalam pembuatan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif dalam batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkatan pemerintahan dan/atau masyarakat, swasta dan masyarakat sipil

untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai tanpa pelibatan pihak swasta dan masyarakat. Sehingga dari kedua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa hubungan kerja sama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana dapat dianggap sebagai suatu bentuk proses kolaboratif.

Collaborative governance ada untuk merespon permasalahan publik dengan melalui kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan, dan diharapkan keterlibatan *stakeholders* dapat membuat penanganan masalah menjadi lebih efektif dan efisien. Maka jika dilihat dari tujuannya, seharusnya pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di TPST Kawasan Tambakrejo dapat mengurangi permasalahan penanganan sampah yang ada.

Pada pelaksanaannya kolaborasi yang terjalin antara instansi pemerintah dengan non instansi pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPST Kawasan Tambakrejo dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena tujuan dari adanya pembangunan TPST tersebut belum tercapai sepenuhnya. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Serta Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan memuat tujuan keberadaan TPST Kawasan Tambakrejo salah satunya mewujudkan visi Desa Tambakrejo yaitu Bebas Sampah dan dapat meningkatkan kreativitas serta peluang usaha ekonomi dan industri kreatif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan yang terkait. Berikut ini akan dijabarkan :

1. Volume sampah yang masuk ke TPST Kawasan Tambakrejo masih tinggi. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh dari DLHK Kabupaten Sidoarjo yang mana total sampah yang masuk di TPST Kawasan Tambakrejo pada bulan Juni 2020 berjumlah 31,200 ton, sedangkan jumlah residu sampah yang dapat ditampung di TPST tersebut adalah 25.000 ton. Selanjutnya diperkuat oleh Kepala Desa Tambakrejo, Nur Machmudi SH dalam sebuah berita online yang dimuat oleh Derap Desa, 2018 mengatakan “Problem di wilayah Kecamatan Waru dengan penduduk yang sangat padat, adalah sampah yang menjadi masalah utama,”.
2. Diduga *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Tambakrejo hanya melibatkan satu pihak saja yaitu dari masyarakat sehingga pengelolaan sampah di desa TPST Tambakrejo masih belum dapat teratasi.
3. Kesadaran masyarakat di Desa Tambakrejo yang masih rendah, menurut hasil wawancara dengan bapak Fachruddin Arrozi selaku ketua KSM Guna Lestari TPST Kawasan Tambakrejo adalah sebagai berikut :

“Justru hambatan yang paling utama adalah dari masyarakatnya yang belum maksimal, seperti masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah. Sudah sering diadakan sosialisasi tetapi masyarakatnya yang belum mau. Selanjutnya masyarakat juga susah untuk membayar iuran”.

Dari kedua penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di TPST Kawasan Tambakrejo belum optimal dan untuk mencapai tujuannya yaitu mengurangi volume sampah yang tinggi dan merubah kesadaran masyarakat untuk bisa mengelola sampahnya menjadi sumber daya belum berhasil.

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kidudalem, Kelurahan Jogosari, Dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan dan penelitian ini berfokus pada bank sampah (Siti Jahro,2018). Namun, penelitian terkait dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo dan yang berfokus pada TPST belum ada. Oleh karena itu peneliti ingin mengisi kekosongan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan menetapkan judul pada penelitian adalah “**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di TPST Kawasan Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Kawasan Tambakrejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan memahami proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Kawasan Tambakrejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik penyusun sendiri maupun pihak yang lain. Terutama kalangan akademis atau masyarakat umum yang juga perlu mengetahui tentang bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses *collaborative governance*, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Penulis

Sebagai ilmu pengetahuan baru dan penambahan pengalaman bagi penulis sehingga hal ini dapat menjadi bahan sebuah referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

- b. Untuk Universitas/Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan data dan informasi yang berguna sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi seluruh mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- c. Untuk Instansi/Dinas/Pihak Lainnya

Sebagai tambahan informasi dan pemberian masukan kepada DLHK Kabupaten Sidoarjo serta dapat dijadikan

sebagai bahan masukan bagi pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan sampah terkait pelaksanaan kolaborasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada.